

SEJARAH, REVOLUSI BERDIRINYA ISLAM IRAN TAHUN 1979 SERTA PERAN ULAMA SYI'AH DALAM POLITIK ISLAM IRAN

Burhanudien¹, Aditya Firmansyah², Zainal Arifin³, Haidar Syahdad Al Khoarizmi⁴, Yunan Fahri Ramadan⁵, Raditya Fangestu⁶, Aidil Fitra Lubis⁷, Muhamad Shoheh⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: burhanudinjulkili47@gmail.com¹, hehchohe@gmail.com²,
muhamadzainalarifin001@gmail.com³, dtycreator78@gmail.com⁴,
haidarsyadad05@gmail.com⁵, fahriyunanramadhan@gmail.com⁶,
231350048.aidil@uinbanten.ac.id⁷, 231350050.raditya@uinbanten.ac.id⁸

Abstrak: Revolusi Islam Iran tahun 1979 merupakan peristiwa geopolitik dan religius yang signifikan di abad ke-20, yang berhasil menumbangkan rezim monarki otoriter Mohammad Reza Pahlavi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejarah revolusi tersebut, peran sentral Ayatullah Ruhollah Khomeini, serta keterlibatan ulama Syi'ah dalam struktur politik modern melalui konsep Velayat al-Faqih. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk membedah data historis dan literatur terkait peradaban Islam di Iran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan revolusi ini didorong oleh integrasi antara gerakan elit intelektual (seperti Ali Syariati) dan kepemimpinan moral-spiritual ulama. Transformasi pemerintahan dari sistem monarki ke republik Islam didasari oleh doktrin Velayat al-Faqih, yang menempatkan ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi (faqih) selama masa kegaiban Imam ke-12. Peran ulama Syi'ah tidak hanya terbatas pada ranah ritual, tetapi juga mencakup pilar pendidikan, moral, solidaritas sosial, serta penjaga kedaulatan negara dari pengaruh sekularisme Barat. Hingga saat ini, sistem ini tetap eksis dan memberikan warna khas pada tatanan politik global dan dunia Islam.

Kata Kunci: Revolusi Iran, Ayatullah Khomeini, Ulama Syi'ah, Velayat al-Faqih, Sejarah Islam.

Abstract: The 1979 Islamic Revolution in Iran was a significant geopolitical and religious event in the 20th century, successfully overthrowing the authoritarian monarchy of Mohammad Reza Pahlavi. This article aims to analyze the history of the revolution, the central role of Ayatollah Ruhollah Khomeini, and the involvement of Shia clerics in modern political structures through the concept of Velayat al-Faqih. This study uses a library research method with a descriptive qualitative approach to analyze historical data and literature related to Islamic civilization in Iran. The results show that the success of this revolution was driven by the integration between the intellectual elite movement (such as Ali Shariati) and the moral-spiritual leadership of the clerics. The transformation of government from a monarchy to an Islamic republic was based on the doctrine of Velayat al-Faqih, which places the clerics as the holders of the highest authority (faqih) during the occultation of the 12th Imam. The role of Shia clerics is not only limited to the ritual realm, but also encompasses the pillars of education, morality, social solidarity, and safeguarding state sovereignty from the influence of Western secularism. Until now, this system still exists and gives a unique color to the global political order and the Islamic world.

Keywords: *Iranian Revolution, Ayatollah Khomeini, Shia Scholars, Velayat Al-Faqih, Islamic History.*

PENDAHULUAN

Republik Islam Iran merupakan salah satu fenomena politik dan keagamaan paling menarik di dunia Islam pada abad ke-20. Peristiwa meletusnya Revolusi 1979 tidak hanya mengubah peta geopolitik di Timur Tengah, tetapi juga meruntuhkan tatanan monarki absolut yang telah bertahan selama ribuan tahun di tanah Persia. Keberhasilan rakyat Iran dalam menumbangkan kekuasaan Mohammad Reza Shah Pahlavi di bawah kepemimpinan seorang ulama karismatik, Ayatullah Ruhullah Khomeini, menjadi bukti nyata bagaimana kekuatan religiusitas mampu bertransformasi menjadi kekuatan revolusioner yang terorganisir.

Urgensi pembahasan mengenai Revolusi Iran terletak pada pergeseran paradigma pemerintahan yang dibawanya. Sebelum revolusi, rezim Pahlavi dikenal sangat pro-Barat dan berupaya melakukan sekularisasi besar-besaran melalui program "Revolusi Putih". Namun, modernisasi yang dipaksakan dari atas tersebut justru menciptakan kesenjangan sosial, kemiskinan, dan alienasi budaya di tengah masyarakat yang memegang teguh tradisi Syi'ah. Hal ini memicu gelombang perlawanan yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari kaum intelektual seperti Ali Syariati hingga jaringan ulama tradisional di pasar-pasar (bazaar).

Di tengah gejolak tersebut, peran ulama Syi'ah muncul sebagai pilar utama yang menyatukan massa. Berbeda dengan gerakan revolusi sekuler di bagian dunia lain, Revolusi Iran memiliki akar ideologis yang dalam pada doktrin keagamaan Syi'ah. Salah satu konsep paling revolusioner yang dicetuskan oleh Imam Khomeini adalah Velayat al-Faqih (Perwalian Ahli Hukum Islam). Konsep ini memberikan legitimasi bagi ulama untuk memegang kekuasaan politik tertinggi, sebuah posisi yang secara historis jarang diambil secara formal oleh ulama Syi'ah sebelum tahun 1979.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejarah dan dinamika Revolusi Islam Iran serta membedah peran strategis ulama Syi'ah dalam politik Islam kontemporer. Melalui pendekatan sejarah peradaban, tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana polarisasi pemerintahan pasca-revolusi terbentuk dan bagaimana struktur kepemimpinan Velayat

al-Faqih memberikan warna baru bagi sistem pemerintahan di dunia Islam hingga saat ini. Melalui kajian literatur yang komprehensif, penulis berusaha menyajikan gambaran objektif mengenai transformasi Iran dari sebuah monarki pro-Barat menjadi Republik Islam yang mandiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau Library Research dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dalam usaha untuk mengungkapkan sebuah permasalahan yang diteliti sebagaimana adanya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang mengungkapkan sebuah situasi sosial yang diteliti secara komprehensif, dan mendalam.

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data yang bersumber dari buku-buku yang membahas secara detail yang berkaitan dengan revolusi Republik Iran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ayatullah Khomeini dalam Proses Berdirinya Republik Islam Iran

Ayatullah Ruhullah Khomeini memainkan peran sentral dalam proses runtuhnya monarki Pahlavi dan berdirinya Republik Islam Iran. Perannya tidak hanya berlangsung pada fase-fase akhir revolusi, tetapi telah dimulai jauh sebelumnya melalui kritik politik, produksi wacana keagamaan, dan konsolidasi jaringan ulama serta massa yang selama ini menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Iran. Khomeini menempatkan dirinya sebagai pemimpin moral sekaligus simbol perlawanan rakyat terhadap rezim otokratis Mohammad Reza Pahlavi. Sebagai seorang ulama yang dihormati, ia mampu menyampaikan kritik terhadap monarki dalam bahasa agama yang meresonansi luas, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah, pelajar agama, hingga kelompok pedagang tradisional (bazaar).

Di pengasingan, khususnya di Najaf (Irak), Khomeini memperluas pengaruhnya melalui ceramah-ceramah yang direkam dan disebarluaskan dalam bentuk kaset sehingga dapat menembus sensor rezim. Ide-idenya mengenai wilayah al-faqih—yakni kepemimpinan fuqaha dalam urusan politik—memberikan landasan ideologis bagi pembentukan negara Islam pascarevolusi. Pemikiran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap monarki, tetapi juga menawarkan formula politik alternatif yang berbeda dari arus sekuler dan modernis. Model kepemimpinan

ulama yang ia gagas menyentuh dimensi spiritual dan sosial, sehingga tetap dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat yang menginginkan perubahan struktural namun tetap memiliki kelekatan pada tradisi keagamaan.

Khomeini juga memperluas pengaruhnya melalui jaringan ulama lokal dan internasional. Dukungan ulama tingkat menengah dan bawah di kota-kota Iran menjadi faktor ¹penting dalam penyebaran pesan-pesan revolusionernya. Mereka menyampaikan khutbah, menggalang protes, dan menjadikan masjid sebagai ruang artikulasi politik. Jaringan ini² berfungsi sebagai lembaga distribusi gagasan sekaligus sebagai struktur mobilisasi massa yang mampu memobilisasi jutaan orang pada tahun 1978–1979. Di saat oposisi sekuler terpecah, jaringan ulama justru konsisten dan terkoordinasi, menjadikan Khomeini sebagai rujukan utama perjuangan politik.

Ketika gelombang protes rakyat mulai meluas pada tahun 1978, Khomeini memanfaatkan momentum tersebut untuk mengonsolidasikan kepemimpinan revolusioner. Ia secara tegas menolak solusi kompromi yang ditawarkan rezim, termasuk pemerintahan militer maupun pembentukan kabinet rekonsiliasi. Sikap keras ini memberi arah moral yang jelas bagi publik bahwa monarki tidak lagi memiliki legitimasi. Sementara itu, ketegasan Khomeini dalam menyerukan pemogokan nasional—terutama di sektor minyak—berkontribusi signifikan terhadap lumpuhnya ekonomi negara, sehingga mempercepat delegitimasi Pahlavi.

Setibanya di Teheran pada Februari 1979, Khomeini memasuki fase politik yang lebih kompleks. Ia tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga pemimpin politik yang menentukan arah pembentukan negara baru. Dalam masa transisi, Khomeini menunjuk Mehdi Bazargan sebagai perdana menteri sementara, langkah yang secara strategis memperlihatkan kemampuannya mengelola berbagai kelompok politik yang beragam. Meski Bazargan berasal dari kelompok moderat dan religius-demokratis, keberadaannya berfungsi sebagai jembatan untuk menenangkan suasana sekaligus memberi ruang legitimasi internasional bagi revolusi. Namun, seiring berjalannya waktu, Khomeini memperjelas bahwa format negara yang ideal adalah negara Islam yang dipimpin oleh ulama, sejalan dengan doktrin wilayat al-faqih.

Khomeini juga memainkan peran penting dalam proses delegitimasi sisa-sisa struktur monarki. Ia mendukung pembentukan Pengadilan Revolusi yang bertugas mengadili tokoh-tokoh

¹ Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet, VI. Jilid I. Jakarta: UI-Press, 1985

² Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*. Jakarta: Kencana, 2004

yang dianggap dekat dengan rezim lama. Pada tahap ini, perannya tidak hanya sebagai pemimpin moral, tetapi juga sebagai aktor politik yang memutus kesinambungan institusional monarki. Melalui fatwa dan instruksi langsung, ia memastikan bahwa aparat keamanan, birokrasi, serta struktur politik yang sebelumnya berada di bawah Shah mengalami restrukturisasi menyeluruh sehingga tidak dapat lagi menghadang proses pendirian sistem baru.³

Pada tahun yang sama, Khomeini mendorong diselenggarakannya referendum nasional mengenai bentuk negara. Hasil referendum—yang secara resmi menunjukkan dukungan mayoritas rakyat terhadap pembentukan “Republik Islam”—menegaskan besarnya legitimasi politik yang ia miliki. Setelah referendum, Khomeini mengawasi penyusunan Konstitusi 1979, yang berhasil memasukkan prinsip wilayah al-faqih sebagai dasar konstitusional negara. Dengan demikian, perannya tidak hanya memimpin revolusi, tetapi juga merumuskan dan menginstitusikan bentuk akhir negara baru sesuai visi ideologisnya.

Selain dinamika politik, Khomeini berhasil menguasai medan simbolik dan kultural revolusi. Penyebutan dirinya sebagai “Imam” memiliki makna politis sekaligus religius yang kuat dalam tradisi Syiah. Gelar ini memberikan otoritas moral yang tidak dimiliki oleh tokoh politik lain, sekaligus membuat setiap instruksi yang ia keluarkan terhubung langsung dengan nilai-nilai teologis. Dalam masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan kuat, legitimasi religius semacam ini berfungsi menjadi basis kestabilan negara baru di tengah situasi pascarevolusi yang penuh ketidakpastian.

Di sisi lain, kemampuan Khomeini menghubungkan isu-isu sosial-ekonomi—seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan korupsi rezim lama—dengan narasi keagamaan menjadi faktor kunci keberhasilan revolusi. Ia berhasil membingkai persoalan politik bukan hanya sebagai konflik kekuasaan, tetapi sebagai perjuangan moral antara “kebenaran” dan “kezaliman”. Pendekatan etis-religius semacam ini memberi ruang partisipasi luas bagi berbagai lapisan masyarakat, dari kelas menengah terdidik hingga kelompok pedesaan yang sebelumnya tidak terlibat dalam politik.

Setelah republik berdiri, Khomeini terus memainkan peran besar dalam proses konsolidasi negara. Ia mengoordinasikan lembaga-lembaga revolusioner seperti Garda Revolusi (IRGC),

³ Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Cet. III. Jakarta: UI Pres, 1991.

Komite Revolusi, dan yayasan-yayasan bantuan sosial. Lembaga-lembaga ini bukan hanya alat kontrol politik, tetapi juga instrumen redistribusi ekonomi yang meneguhkan dukungan rakyat terhadap sistem baru. Keberadaan mereka memungkinkan negara baru bertahan dalam tekanan internal maupun eksternal, termasuk perang Iran Irak yang dimulai pada 1980.

Dengan demikian, peran Khomeini dalam proses berdirinya Republik Islam Iran dapat dilihat sebagai gabungan antara kepemimpinan spiritual, strategis, ideologis, dan organisatoris. Ia bukan sekadar simbol revolusi, tetapi arsitek utama yang merancang struktur politik baru, membangun legitimasi keagamaan, mengonsolidasikan jaringan sosial, dan memastikan ⁴bahwa visi negara Islam—sebagaimana ia pahami terwujud dalam sistem kenegaraan Iran pasca-1979

Pengertian Revolusi

Membahas tentang revolusi Iran, dalam analisa peneliti harus tuntaskan terlebih dahulu pengertian dari revolusi. Adanya pemahaman tentang pengertian revolusi memudahkan dan mengantarkan pembaca untuk memasuki kajian utama dalam penulisan makalah ini.

Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Rekayasa Sosial; Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar?*, menguraikan bahwasannya revolusi ditandai dengan tiga hal, yaitu Pertama, perubahan yang mendasar, menyeluruh segala aspek, dan multidimensional; Kedua, revolusi melibatkan massa yang besar dan di mobilisasikan serta bergerak dalam gerakan revolusioner; Ketiga, selalu melibatkan kekerasan dan koersi.

Ketiga unsur tersebut adalah hal utama yang melatarbelakangi terjadinya revolusi, berbeda halnya dengan pandangan Sztompka yang menyimpang dari berbagai tulisan tentang revolusi dan adanya sepuluh tahap revolusi, dan penulis hanya menguraikan enam tahap, yang memiliki keterkaitan dengan revolusi Iran, yaitu Pertama, semua revolusi dimulai dengan keadaan yang disebut Brinton sebagai *Revolutionary Prodrone* yakni intensifikasi kekecewaan, keluhan, kekacauan, dan konflik karena krisis ekonomi atau keuangan; Kedua, muncul suara-suara kritis yang menuntut pembaruan, berbagai agitasi, suara-suara keras menentang rezim mulai muncul. Ada wacana protes di kalangan para cendekiawan. Sebuah kesadaran sosial—semangat revolusi—perlahan menyebar di tengah-tengah masyarakat; Ketiga rezim berusaha mengendalikan gerakan

⁴ Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. *"Revolusi Iran 1979 dan Dinamika Politik Nasional."* Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1, 2015.

protes ini dengan reformasi setengah-setengah; Keempat, negara tidak dapat menggunakan alat pemaksa (selalu militer) untuk mengatasi keadaan; Kelima, rezim lama tumbang. Muncul 'Bulan Madu' revolusi. Ada periode euphoria setelah kemenangan; Keenam, terjadi perpecahan internal di kalangan revolusioner yang⁵ ⁶menang. Kaum konservatif ingin meminimalkan perubahan. Kaum radikal ingin bergerak cepat, kaum moderat ingin perubahan gradual.

Revolusi dari penjelasan Sztompka tentunya diuraikan secara garis besar dan adanya generalisasi dalam penelaahannya. Tahap tersebut hanya menjelaskan bagaimana revolusi terjadi, dan tidak menjelaskan mengapa revolusi terjadi. Penjelasan tentang revolusi didasarkan dengan data post facto yaitu setelah kejadian.

Lahirnya Revolusi Republik Iran

Menurut Amien Rais, pada abad ke-20 paling tidak ada tiga revolusi besar yang mempunyai dampak luas melampaui batas-batas wilayah tempat asal revolusi-revolusi tersebut, diantaranya Pertama, Revolusi Rusia 1917 yang merupakan revolusi sosialis pimpinan Vladimir Illich Lenin; Kedua, Revolusi Mao Zedong pada 1949 di daratan Cina, melalui long march yang cukup menakjubkan. Wajah Asia pada pasca Perang Dunia II mengalami perubahan yang sangat besar akibat keberhasilan Mao mentransformasikan Cina menjadi negara sosialis Marxis di Asia; Ketiga, Revolusi yang mempunyai dampak luas melampaui batas-batas wilayah tempat asal revolusi-revolusi tersebut, diantaranya Pertama, Revolusi Rusia 1917 yang merupakan revolusi sosialis pimpinan Vladimir Illich Lenin; Kedua, Revolusi Mao Zedong pada 1949 di daratan Cina, melalui long march yang cukup menakjubkan. Wajah Asia pada pasca Perang Dunia II mengalami perubahan yang sangat besar akibat keberhasilan Mao mentransformasikan Cina menjadi negara sosialis Marxis di Asia; Ketiga, Revolusi

Republik Islam Iran (Revolusi Iran) pimpinan Ayatullah Khomeini yang pecah pada 1979 yang mengguncangkan sendi-sendi hubungan internasional di kawasan Timur Tengah dan berdampak secara internasional. Revolusi Iran itu berhasil membebaskan rakyat Iran dari belenggu

⁵ Thahir, Adjib. *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam*. Cet, I. Jakareta : PT, Raja Grafindo Persada, 2004.

⁶ Siddiqie, Nurzzaan., *Syiah dan Thawarij dalam Prespektip Sejarah*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.

Amerika, setelah negara adidaya cukup lama memegang kendali Syah, sehingga Iran tidak punya kedaulatan dalam arti kata sebenarnya..

Keberhasilan Revolusi Iran mengundang berbagai macam perdebatan dan polemik di dalamnya. Analisis Riza Sihbudi dan pernyataan Amien Rais menunjukkan keberhasilan Iran yang dibawah kendali Ayatullah Khomeini dalam menggulingkan pemerintahan Reza Pahlavi. Hasil analisis tersebut dibantah oleh beberapa kalangan dan peneliti ilmu sosial bahwasannya revolusi Iran bukanlah membebaskan rakyat Iran dari belenggu Amerika Serikat, akan tetapi revolusi tersebut menimbulkan berbagai macam resiko dan dampak yang besar bagi masyarakat Iran sendiri, dikenal dengan istilah Revolusi Iran sebagai “anak angkatnya sendiri”.

Peneliti tidak berada dalam pihak manapun, akan tetapi perdebatan ini dapat mewarnai khazanah pemikiran, sebab selama ini dalam pantauan peneliti berkembang pemahaman di kalangan masyarakat bahwasannya Revolusi Iran adalah sebuah keberhasilan yang hebat dari seorang ulama, Ayatullah Khomeini.

Keberhasilan Khomeini masih dipertanyakan oleh peneliti ilmu sosial, khususnya spesialis Iranian Studies. Pertanyaan mendasar yang dialami adalah keberhasilan tunggal revolusi berasal dari kaum ulama (mullah). Beberapa pihak menolak argumen ini, selain ulama juga terdapat kalangan intelektual dalam memperjuangkan revolusi tersebut, namun kalangan intelektual tersebut seperti “tenggelam” dalam wacana pergerakan Revolusi Iran. Azyumardi Azra merumuskan bahwa terdapat dua kelompok yang paling berpengaruh dalam perumusan filsafat pergerakan revolusi Iran, yaitu Pertama, elit ulama (Religios Scholar) diantara ulama elite yang paling menonjol adalah Ayatullah Khomeini dan Murtadha Mutahhari; Kedua, Elit Intelektual (Intelektualis) tokoh yang menonjol adalah Ali Syariati, Mehdi Bazargan, dan Bani Sadr.

Dua kelompok yang diuraikan oleh Azra merupakan sumber terhadap perumusan pergerakan revolusi Iran yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini. Pertanyaan muncul bahwasannya ide serta taktik dalam perumusan filsafat pergerakan Revolusi Iran berasal dari elite intelektual yaitu Ali Syariati. Sosok Ali Syariati tidak begitu disampaikan dalam pergerakan Revolusi Iran, dan hanya Khomeini yang diperankan sebagai tokoh utama dalam revolusi. Ali Rahnama menjelaskan bahwa Ali Syariati merupakan sosok sentral dalam keberhasilan Revolusi Iran, bahkan beliau dijuluki Bapak Ideologi Revolusi Iran pada tahun 1979. Masa semua kekuasaan Reza Pahlavi Syariati terlibat aktif dalam berbagai macam perubahan yang dialami oleh

masyarakat Republik Islam Iran, baik dalam aspek ekonomi, politik, budaya, agama dan lain sebagainya.

Perumusan kejatuhan Reza Pahlavi pada tahapan selanjutnya di sistematisasikan dalam wacana pemberontakan yang dibagi dalam dua kategori yaitu subversi religius dan subversi politik. Adanya subversi religius dalam yang mempunyai dampak luas melampaui batas-batas wilayah tempat asal revolusi-revolusi tersebut, diantaranya Pertama, Revolusi Rusia 1917 yang⁷ merupakan revolusi sosialis pimpinan Vladimir Illich Lenin; Kedua, Revolusi Mao Zedong⁸ pada 1949 di daratan Cina, melalui long march yang cukup menakjubkan. Wajah Asia pada⁹ pasca Perang Dunia II mengalami perubahan yang sangat besar akibat keberhasilan Mao mentransformasikan Cina menjadi negara sosialis Marxis di Asia; Ketiga, Revolusi

Republik Islam Iran (Revolusi Iran) pimpinan Ayatullah Khomeini yang pecah pada 1979 yang mengguncangkan sendi-sendi hubungan internasional di kawasan Timur Tengah dan berdampak secara internasional. Revolusi Iran itu berhasil membebaskan rakyat Iran dari belenggu Amerika, setelah negara adidaya cukup lama memegang kendali Syah, sehingga Iran tidak punya kedaulatan dalam arti kata sebenarnya.

Keberhasilan Revolusi Iran mengundang berbagai macam perdebatan dan polemik di dalamnya. Analisis Riza Sihbudi dan pernyataan Amien Rais menunjukkan keberhasilan Iran yang dibawah kendali Ayatullah Khomeini dalam menggulingkan pemerintahan Reza Pahlavi. Hasil analisis tersebut dibantah oleh beberapa kalangan dan peneliti ilmu sosial bahwasannya revolusi Iran bukanlah membebaskan rakyat Iran dari belenggu Amerika Serikat, akan tetapi revolusi tersebut menimbulkan berbagai macam resiko dan dampak yang besar bagi masyarakat Iran sendiri, dikenal dengan istilah Revolusi Iran sebagai “anak angkatnya sendiri”.

Peneliti tidak berada dalam pihak manapun, akan tetapi perdebatan ini dapat mewarnai khazanah pemikiran, sebab selama ini dalam pantauan peneliti berkembang pemahaman di kalangan masyarakat bahwasannya Revolusi Iran adalah sebuah keberhasilan yang hebat dari seorang ulama, Ayatullah Khomeini.

⁷ Ibrahim, Anwar. *Revolusi Iran dan Transformasi Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

⁸ Bagir, Haidar. *Pemikiran Politik Syiah: Telaah Historis dan Filosofis*. Bandung: Mizan, 2011

⁹ Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*. Jakarta: Kencana, 2004.

Keberhasilan Khomeini masih dipertanyakan oleh peneliti ilmu sosial, khususnya spesialis Iranian Studies. Pertanyaan mendasar yang dialami adalah keberhasilan tunggal revolusi berasal dari kaum ulama (mullah). Beberapa pihak menolak argumen ini, selain ulama juga terdapat kalangan intelektual dalam memperjuangkan revolusi tersebut, namun kalangan intelektual tersebut seperti “tenggelm” dalam wacana pergerakan Revolusi Iran. Azyumardi Azra merumuskan bahwa terdapat dua kelompok yang paling berpengaruh dalam perumusan filsafat pergerakan revolusi Iran, yaitu Pertama, elit ulama (Religios Scholar) diantara ulama elite yang paling menonjol adalah Ayatullah Khomeini dan Murtadha Mutahhari; Kedua, Elit Intelektual (Intelektualis) tokoh yang menonjol adalah Ali Syariati, Mehdi Bazargan, dan Bani Sadr.

Dua kelompok yang diuraikan oleh Azra merupakan sumber terhadap perumusan pergerakan revolusi Iran yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini. Pertanyaan muncul bahwasannya ide serta taktik dalam perumusan filsafat pergerakan Revolusi Iran berasal dari elite intelektual yaitu Ali Syariati. Sosok Ali Syariati tidak begitu disampaikan dalam pergerakan Revolusi Iran, dan hanya Khomeini yang diperankan sebagai tokoh utama dalam revolusi. Ali Rahnema menjelaskan bahwa Ali Syariati merupakan sosok sentral dalam keberhasilan Revolusi Iran, bahkan beliau dijuluki Bapak Ideologi Revolusi Iran pada tahun 1979. Masa semua kekuasaan Reza Pahlavi Syariati terlibat aktif dalam berbagai macam perubahan yang dialami oleh masyarakat Republik Islam Iran, baik dalam aspek ekonomi, politik, budaya, agama dan lain sebagainya.

Cita-cita Pahlavi tersebut, berlandaskan kejayaan masa lalu Iran sebagai bukti kerajaan terbesar di dunia. John H. Lorentz mencatatkan muatan histori negara Iran dari peneliti mengambil dari periode Islam semenjak lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama, Periode Islam (570 M – 651); Kedua, Periode Shafavi (1501 – 1722); Ketiga, Periode Afsharid dan Zand (1736 – 1750/1794); Keempat, Periode Qajar (1796 – 1925); Kelima, Periode Pahlavi I (1925 – 1978); Keenam, Periode Republik Islam (1979 – s/d sekarang).

Periode masa kekuasaan di Iran dari penelitian John H Lorentz membuktikan bahwasannya Iran yang saat ini dimuat dan disajikan tidak dapat ditaklukkan oleh Turki Usmani. Diberi dengan tidak adanya periode kekuasaan Turki Usmani dalam diagram yang digambarkan oleh John H. Lorentz.

Kekuasaan Safawi tidak dapat dibandingkan dengan kekuasaan Turki Usmani yang hanya pada wilayah kekuasaannya, namun demikian disebutkan bahwa ketika itu Iran tidak dapat diandalkan dengan sebuah bangsa, melainkan sebuah dinasti yang disebutkan dalam sejarah yang mampu mengancam Turki Usmani. Adel Allouche menguraikan tentang konflik yang terjadi antara Safawi dan Turki Usmani, yaitu sepanjang tahun sekitar 1514 M Syah Ismail membawa 200.000 tentara Turki ke Sufi Safawi, melewati Anatolia dan Azerbaijan, sehingga akhirnya berhadapan dengan pasukan Safawi di Chaldiran, Barat laut Iran. Pasukan Turki Usmani memasuki Tabriz setelah pertempuran ini, tetapi Syah Salim tidak berhasil mendesak pasukannya untuk melewati musim dingin di Tabriz serta meneruskan serangan terhadap kerajaan Safawi. Mereka akhirnya meninggalkan tempat itu beberapa hari kemudian.¹⁰

Eksistensi Islam Iran Pasca Revolusi

Membicarakan tentang eksistensi Muslim Iran dan sejarah Islam di Iran, fokusnya adalah tentang sejarah perkembangan Islam di negara tersebut terutama pasca revolusi, sebab pra revolusi secara eksplisit telah disinggung dalam uraian-uraian terdahulu. Boleh dikata bahwa keadaan Islam pra revolusi telah mengalami sejarah yang cukup panjang, bermula dari tahun 2700 SM sampai memasuki tahun 1979 sebagaimana yang telah dikemukakan. Dengan demikian, bahasan berikut fokus sejak tahun 1979 sampai sekarang, sebagai masa yang dikenal pasca revolusi Iran.

Menurut Zayar, awal mula terjadinya revolusi Iran, di sejumlah daerah utara, rakyat membentuk dewan dalam rangka menjalankan urusan mereka sehari-hari. Untuk jenis administrasi yang serupa, dewan juga dibentuk setelah pemberontakan yang dilakukan tubuh angkatan udara siuras-e-home farain (dewan dinas angkatan udara). Organisasi dan perusahaan milik buruh, bermunculan di mana-mana setelah revolusi, masih terus berdiri kokoh selama beberapa waktu, berjuang gigih demi bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Akan tetapi, dengan ketiadaan partai revolusioner kelas pekerja yang murni, maka mereka bertempur untuk kalah, segera setelah negara baru memkonsolidasikan diri, suatu kampanye nasional tentang intimidasi, pelecehan, dan terorisme mulai menentang kaum buruh. Sesudah pemerintah menginvasi Kurdistan dan mengadakan restorasi gradual dalam kebijakan pemerintah berupa manajemen dari atas, unsur-

¹⁰ urnal Ilmu Hubungan Internasional. *"Revolusi Iran 1979: Analisis Gerakan Sosial Berbasis Religi."* Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 2, 2014.

unsur kekuatan kaum buruh dalam pabrik-pabrik ditindas secara brutal. Setelah langkah mundur ini, terdapat gejala penurunan gerakan buruh secara umum. Dalam kesemuanya ini, Partai Tudeh secara solid berdiri di belakang pemerintah dan menyokong Khomeini.

Adapun tokoh penting sejarah perkembangan Islam di Iran sejak awal mula berdirinya negara tersebut sebagaimana yang berkali-kali disebutkan adalah Ayatullah Khomeini. Tokoh ini berhasil merekayasa keruntuhan monarki Persia, dan menjadikan Iran sebagai negara yang bermartabat (wilayah al-faqih) dengan melembagakan ideologis atas gagasan-gagasan politik Syiah. Dengan demikian, dalam memahami perkembangan Islam di Iran, mesti dipahami¹¹ perkembangan mazhab Syiah. Atau dengan kata lain, perkembangan Syiah di Iran merupakan petanda perkembangan Islam di Iran, sebab qanun (undang-undang) yang diberlakukan pasca revolusi adalah berdasarkan pada mazhab Syiah.

Berdasarkan data yang penulis temukan dalam berbagai literatur, dari sekian penduduk Iran (tahun 2000) dengan jumlahnya 159.051.000 jiwa, 93% adalah masyarakat Muslim Syiah, dan 5% Sunni, selebihnya 2% agama lain. Demikian dominannya populasi Syiah, sehingga bisa juga dikatakan bahwa Iran adalah negara Islam Syiah yang secara yuridis formal dan faktual menjalankan undang-undang kenegaraan berdasarkan ijtihad dengan sebutan wilayah al-faqih. Peran dan tanggung jawab wilayah al-faqih ini dapat tergambarkan dalam petikan Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran tentang kepemimpinan negara, bab I pasal 5:

"Selama masa ketidakhadiran Imam yang kedua belas (semoga Allah mempercepat kedatangannya), dalam Republik Islam Iran, kepemimpinan urusan-urusan dan pimpinan umat merupakan tanggung jawab faqih yang adil dan taqwa, mengenal jaman, pemberani, giat dan berinisiatif yang dikenal dan diterima oleh mayoritas umat sebagai pemimpin mereka. Apabila faqih seperti itu tidak mempunyai mayoritas semacam itu, suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari para fuqaha' yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas akan memegang tanggung jawab itu.

Lebih lanjut Munawir Syadzali menjelaskan bahwa ketika Muslim Iran memasuki masa revolusi, tampaknya pemerintahan Islam Iran sebagai perpaduan antara dua konsepsi modern dan Imamiyah, maka seperti halnya di negara-negara lain, di Iran sekarang terdapat lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan sebagainya. Ada presiden (kepala negara) dan kabinet, ada pula

¹¹Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. "Revolusi Iran 1979: Analisis Gerakan Sosial Berbasis Religi." Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 2, 2014.

departemen, dewan perwakilan rakyat dan anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, tetapi di atas lembaga-lembaga itu semua terdapat seorang ilmuwan agama yang memiliki kata akhir, dan dimana perlu, dapat menolak untuk menyetujui keputusan atau kebijaksanaan yang diambil oleh lembaga-lembaga tersebut.

Demikian pula dengan Lapidus yang menyatakan bahwa revolusi Islam Iran melahirkan konfigurasi yang khas antara negara Iran dan institusi Islam, bahkan ia merupakan sebuah peristiwa besar dalam seluruh sejarah masyarakat Islam. Revolusi tersebut menandai puncak pergolakan antara negara Iran dan kelompok ulama yang telah berlangsung selama sekitar 200 tahun. Meski demikian, pola hubungan ulama-negara dalam sejarah Iran terutama setelah memasuki abad ke-19, tepatnya sesaat revolusi Iran terjadi paham Syiah telah menjadi bagian penting bagi ulama Iran, dan umat Islam Iran. Dengan demikian, revolusi Iran tidak dapat dikatakan sebuah oposisi agama yang bersifat inbern terhadap otoritas negara, melainkan harus dipahami sebagai respons terhadap beberapa situasi spesifik.

Yang jelasnya, bagi masyarakat dunia Islam, revolusi Iran merupakan kejadian yang secara simbolis penting. Revolusi Iran memperlihatkan bahwa rezim sekuler yang dipengaruhi oleh Barat dapat ditumbangkan oleh kekuatan oposisi yang diorganisasi oleh para pembaharu Islam.

Karena kaum revitalis Islam mendengungkan perubahan seperti itu sejak akhir abad ke-19, mesti tidak berhasil, revolusi mampu memberikan daya dorong baru bagi perjuangan mereka dan memicu munculnya aktivitas fundamentalisme Islam dari Maroko hingga Asia Tenggara.

Namun, sesuatu hal yang menjadi perhatian dunia bersamaan dengan revolusi Iran, sebab sesaat terjadinya revolusi Iran, sejarah umat Islam Iran langsung bersentuhan dengan konflik. Hal itu dipahami dengan terjadinya Krisis Teluk pertama yang pada September 1980, Irak menginvasi Iran dan perang saling balas-membalas yang berlumuran darah terjadi sampai tahun 1988. Konflik terjadi delapan tahun lamanya, sementara bangsa-bangsa Muslim telah berulang kali menghimbau kedua negara tersebut merujuk.

Pasca Perang Teluk, masyarakat Muslim Iran kembali berkabung nasional tepatnya pada 3 Juni 1989 oleh karena Khomeini meninggal. Sebagai pemimpin spiritual tertinggi Iran, ia digantikan oleh Ayatullah Ali Khomeini. Di bawah kepemimpinannya, para ulama dilibatkan, dan mereka melakukan perubahan (reformasi) kehidupan sosial dari corak kebebasan Barat menjadi

perilaku kehidupan masyarakat Muslim. Dari sini kemudian berlanjut ke babakan signifikan perkembangan sejarah Islam di Iran, sampai saat ini.

Pemerintahan Islam Iran, saat ini mengkonsepsikan bahwa semua urusan agama harus berpegang pada imam, sebagaimana kaum sunni mengembalikan seluruh persoalan agama pada al-Qur'an dan Sunnah dan ajaran Nabi Muhammad Saw. Bagi umat Islam Iran, manusia sepanjang masa tidak pernah sunyi dari imam, karena masalah keagamaan dan keduniaan selalu membutuhkan bimbingan para imam. Bahkan, mereka mengatakan, menentukan imam ialah yang lebih penting dalam Islam.¹²

Dengan konsep pemerintahan Iran yang demikian, masyarakat Muslim Iran bangkit melawan penindasan itu dengan dipimpin oleh seorang alim yang kharismatik, seorang mujtahid yang wara', zuhud dan sekaligus filosof Muslim yang ahli irfan: Ayatullah Ruhullah al-Musawi al-Khomeini. Kekuatan apa yang melatarbelakangi masyarakat Muslim Iran sehingga begitu gigih mereka dalam melawan gagasan sekuler, larisasi dan westernisasi, dan berhasrat untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidup mereka dalam segala aspek kehidupannya. Bagaimana pula keyakinan mereka tentang khilafah dan imamah dalam kerangka kenegaraan pasca tergulingnya Syah Iran itu sebagaimana yang telah disinggung.

Seakan belum selesai terjawab, muncul fenomena kedua yang tak kalah pentingnya, yaitu tergulingnya Saddam Husein dari singgasana kekuasaannya di Irak, bahkan nyawanya terenggut dengan putusan hukum mati dari majelis hakim. Irak dengan pemimpinnya yang semula ketika berkuasa didukung penuh oleh negara-negara Arab dan negara-negara sekutu, dengan dukungan persenjataan modern, termasuk senjata kimia, menghabiskan dana miliaran dollar dalam perangnya selama delapan tahun melawan Iran. Padahal Iran baru setahun melewati masa revolusi dan terlepas dari hegemoni negara-negara Barat. Dunia terkejut bahwa negeri Iran sebagai pemeluk mazhab Syiah (mazhab Ja'fari atau Syiah Imamiyah). Mereka tinggal di sekitar makam-makam suci imam mereka yang antara lain terletak di Najaf dan Karbala, Irak. Pemeluk mazhab itu tidak lain adalah orang-orang yang sejak dahulu kala percaya bahwa keluarga suci (ahlul bait) Nabi Saw. adalah panutan dan pembimbing spiritual yang tak akan pernah menyimpang dari kebenaran sebagai pedoman kehidupan yang terus meningkat semakin membebani rakyat. Banyak

¹² Jurnal Penelitian Politik LIPI. *"Struktur Kekuasaan Iran Pasca-Revolusi."* Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11, No. 2, 2014

sejarawan menilai bahwa pertumbuhan cepat tanpa fondasi sosial yang memadai menyebabkan “overdevelopment”—pembangunan yang lebih cepat daripada kemampuan negara dan masyarakat untuk menanganinya.

Ulama Syi’ah sebagai Pilar Pendidikan, Moral, dan Solidaritas Sosial

Ulama Syi’ah memiliki posisi penting sebagai pilar pendidikan dan moral dalam komunitas mereka. Sebagai cendekiawan agama dan pemimpin spiritual, mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti hawzah (seminari Syi’ah), yang tidak hanya¹³ mentransmisikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk identitas komunitas, menanamkan norma moral, dan memperkuat kohesi sosial. Melalui pendidikan ini, komunitas memperoleh kader ulama baru sekaligus menjaga kesinambungan tradisi keagamaan dan identitas kolektif.

Dalam masyarakat plural, termasuk di mana komunitas Syi’ah menjadi minoritas, ulama berfungsi sebagai mediator moral dan sosial. Mereka menjadi rujukan ketika komunitas menghadapi tantangan sosial, ekonomi, atau konflik identitas memberikan bimbingan, fatwa, dan arahan keagamaan yang membantu menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, kehadiran ulama Syi’ah bukan hanya soal agama, tetapi juga jembatan sosial dan moral bagi komunitas mereka.

Peran pendidikan dan bimbingan moral ulama juga berkontribusi pada solidaritas sosial. Tradisi pengajian, majelis keagamaan, dan aktivitas sosial berbasis komunitas berfungsi sebagai ruang berkumpul, mempererat ikatan, dan membangun jaringan sosial yang saling mendukung. Dalam banyak komunitas, struktur keagamaan yang kuat serta kepemimpinan ulama terbukti meningkatkan ketahanan komunitas dalam menghadapi tekanan sosial dan perubahan lingkungan.

Peran ulama Syi’ah dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim tidak muncul begitu saja. Akar sejarahnya bermula sejak masa awal Islam, terutama setelah peristiwa politik besar yang menimpa keluarga Nabi. Dukungan kepada Ali bin Abi Thalib bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga keyakinan bahwa ilmu, akhlak, dan kedekatan beliau dengan Nabi menjadi dasar kepemimpinan umat. Dari keyakinan itu lahir komunitas yang menjadikan Ahlulbait sebagai rujukan agama.

¹³ Algar, Hamid, *“Imam Khomeini: Penjelmaan Sebuah Tradisi”*, dalam buku, *Gerbang Kebangkitan: Revolusi Islam Dan Khomeini dalam perbincangan*, Ed. Mustafa W. Hasyim, Yogyakarta: Shalahudin Press, 1984 M

Kontribusi Ulama Syi'ah dalam Pelestarian Tradisi dan Kebudayaan Syi'ah

Ulama Syi'ah memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta kebudayaan komunitas mereka. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga meluas ke ranah sosial, pendidikan, dan seni budaya yang menjadi identitas komunitas Syi'ah. Kontribusi ulama dalam hal ini menjadi jembatan antara sejarah, nilai-nilai religius, dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat, sehingga tradisi Syi'ah tetap hidup dan relevan di berbagai generasi

Salah satu bentuk pelestarian tradisi yang dilakukan ulama Syi'ah adalah melalui penyelenggaraan majelis ilmu dan peringatan hari-hari penting keagamaan, seperti Asyura dan Arba'in. Kegiatan ini bukan hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral, solidaritas, dan identitas kolektif. Melalui majelis ilmu, masyarakat diajak untuk memahami sejarah Ahlulbait, mengapresiasi karya sastra keagamaan, dan mengikuti ajaran etika yang menjadi pedoman hidup komunitas

Selain itu, ulama juga berperan dalam dokumentasi dan transmisi budaya Syi'ah melalui karya tulis, pengajaran di lembaga pendidikan, dan pendampingan masyarakat dalam praktik keagamaan. Misalnya, pengajaran fikih, tafsir Al-Qur'an, dan hadis Syi'ah dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa pengetahuan keagamaan tidak hilang seiring perubahan zaman. Peran ini juga terlihat dalam upaya mereka mempertahankan bahasa, musik ritual, dan seni kaligrafi yang memiliki nilai historis dan estetik tinggi dalam komunitas Syi'ah

Kontribusi ulama Syi'ah dalam pelestarian tradisi dan kebudayaan juga penting dalam menjaga toleransi dan harmoni sosial. Dengan memfasilitasi dialog antaragama, kolaborasi dalam kegiatan sosial, dan keterlibatan dalam pendidikan masyarakat, ulama berperan sebagai mediator yang memastikan tradisi Syi'ah tetap dikenal dan diterima tanpa menimbulkan konflik dengan lingkungan sekitar. Keberadaan mereka membuat masyarakat mampu menyeimbangkan praktik religius dengan dinamika sosial, sekaligus mempertahankan identitas budaya yang unik.

Dengan demikian, kontribusi ulama Syi'ah bukan hanya berupa pengajaran keagamaan, tetapi juga pelestarian tradisi dan budaya yang membentuk identitas komunitas. Mereka menjadi simbol kontinuitas dan kekuatan sosial yang menjaga agar nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat diwariskan secara utuh kepada generasi berikutnya

perkembangan gerakan syi'ah dan revolusi iran

Gerakan syi'ah seperti yang kita kenal merupakan hasil dari suatu proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, untuk sebuah kurun waktu yang cukup lama, gerakan syi'ah dapat dikatakan hanya sebagai gerakan protes saja. Baru kemudian, faham ini membentuk teologi, sistem agama, dan sosial politiknya sendiri. Pada mulanya, protes itu berbentuk protes¹⁴ sosial dan politik, terutama dalam menghadapi sikap penindasan dari pihak penguasa, terlebih ketika pada masa bani Umayyah berkuasa.

Namun dalam perkembangan gerakan Syi'ah tidak lagi berbentuk suatu gerakan protes, tetapi telah mengambil bentuk suatu sekte, dimana ciri khasnya yang penting adalah kepercayaan akan Imam yang tidak dapat tersalahkan sertaprinsip taqiyah atau kitman yang mengajarkan cara menyembunyikan kepercayaan yang sesungguhnya pada saat situasi yang tidak menguntungkan.

Dalam hubungannya dengan sejarah Iran modern, munculnya kelompok Syi'ah yang cukup menentukan baru terjadi ketika dinasti safawi (1502-1722) menjadikan sekte syi'ah, sebagai agama resmi. Para pemuka Syi'ah berhasil memantapkan eksistensinya sehingga mereka dapat memainkan peranan yang cukup penting dalam negara. Di samping itu, dalam kelompok Syi'ah sendiri terdapat banyak sekali pengelompokan-pengelompokan sehingga pernah dikatakan bahwa satu-satunya hal yang teratur dalam kelompok Syi'ah itu adalah ketidakteraturannya. Di samping itu tidak semua bidang agama berada dalam kekuasaan mereka. Setelah terjadi revousi konstitusi di Iran tahun 1906, para pemimpin agama dalam kalangan Syi'ah, yang banyak dari mereka ikut serta dalam revolusi itu, mengundurkan diri dari dunia politik, setelah mereka menyadari bahwa gerakan sekularisasi telah mendapat kemenangan.

Pada tahun 1941, Syeh Reza dipaksa untuk turun tahta setelah terjadinya invansi pihak sekutu dan persaingan politik terjadi kembali ke negara Iran selama dua belas tahun. Dalam kurun waktu ini, boleh dikatakan bahwa tokohtokoh agama tidak memainkan peranan politik sama sekali. Tahun 1949, di kota Qum diadakan sebuah seminar tentang hubungan politik dengan agama. Dalam seminar tersebut diputuskan bahwa “ barang siapa yang memakai jubah pemimpin agama harus berhenti dari melakukan campur tangan dalam masalah-masalah kaum politisi dan partai

¹⁴ Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, Hasil Amandmen Tahun 1989 M, h. 19

politik atau menjadi alat dari tujuantujuan mereka. Namun sikap ini tentu tidak dapat dipaksakan kepada semua orang.

Ayatullah Abdulqosim kashani, yang merupakan sekutu penting dari mohammad mossadegh (perdana menteri terakhir dimasa itu, 1951-1953), telah berusaha mengumpulkan dukungan bagi pemerintaahan nasionalis Mossadegh sampai persatuan mereka pecah pada 1952. Berkat dukungan Ayatullah Kashani, calon-calon yang mendukung Mossadegh meraih ¹⁵¹⁶kemenangan dalam pemilihan umum sehingga mengalahkan Front Nasional yang sekuler. Setelah Mossadegh dapat digulingkan dalam sebuah kudeta yang didalangi Barat. Maka kalangan pemimpin agama juga memainkan peranan dalam gerakan oposisi bawah tanah.

Dengan ini, telah terjadi suatu revolusi yang mengembalikan faham Syi'ah ke tengah-tengah percaturan dunia, baik dari segi keislaman maupun dari segi hubungan Internasional. Pada tanggal 11 Februari 1997, Syah Iran yang sebelumnya amat sangat berkuasa ditumbangkan dalam sebuah revolusi Islam, yang dimotori oleh Ayatullah Khomeini. Dengan demikian, terjadilah sebuah perubahan besar dalam konstilasi politik di Timur Tengah, dan dunia. Sebelum revolusi Iran, Syah Iran dianggap sebagai seorang yang paling berkuasa di Timur Tengah karena kekuatan militer yang telah dibangunnya sejak lama. Di dalam negeri, ia dianggap telah berhasil memakmurkan rakyatnya dengan jalan mengadakan pembangunan-pembangunan terutama dibidang pertanian, yang terkenal dengan sebutan revolusi putih. Semua pembangunan yang dilakukan Syah Iran adalah akibat dari pendapatan besar yang diterima dari minyak.

Akan tetapi segala hasil yang telah dicapai itu dibayar dengan harga yang cukup mahal. Syah Iran semakin jauh dari kelompok pemuka agama. Para pemuka agama ini merasa resah terhadap proses sekularisasi yang terjadi sehingga semakin lama semakin jauh dari semangat agama Islam. Oleh sebab itu, golongan pemuka agama ini telah berubah menjadi kelompok oposisi yang menjadi potensi untuk mendatangkan ancaman besar bagi rezim Syah Iran. Di luar negeri, Iran di bawah Syah Iran menjadi sekutu Amerika untuk menghadapi Uni Soviet ketika itu. Peranan Iran yang berbatasan langsung dengan Uni Soviet dipandang sangat penting.

¹⁵ Thahir, Adjib. *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam*. Cet. I. Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2004.

¹⁶ Azra, Azyumardi. . *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara* Jakarta: Kencana, 2004

Fatwa dalam sejarah politik iran

Para ulama Syi'ah mulai tampil ke depan publik sejak naiknya dinasti Syafawi sebagai penguasa Iran pada permulaan abad ke-16. Pada masa ini, Syi'ah Imamiyah dijadikan sebagai agama resmi negara. Walaupun di saat yang sama, mayoritas penduduk Iran masih menganut sunni. Sebagai bukti dari dimulainya penerapan Syi'ah sebagai ideologi resmi negara, nama-nama para Imam Syi'ah selalu disebut dalam khotbah Jumat dan juga dicetaknya koin uang^{17 1819} yang dicap dengan slogan-slogan Syi'ah. Tidak diragukan lagi, diberlakukannya paham Syi'ah Imamiyah di Iran menjadi hal yang paling prestisius dan abadi dari prestasi Syafawi.

Di zaman Syafawi inilah embrio terbentuknya pemerintahan Islam Wilayat al-Faqih di Iran. Walaupun peran para ulama ketika itu belum signifikan pada zaman modern, tetapi para ulama Syi'ah mulai dapat mengidentifikasi diri mereka yang tidak hanya berperan dalam dunia keagamaan semata, namun juga memiliki kewajiban sebagai pemegang kendali moral sosial masyarakat.

Otoritas ulama pada masa ini secara sederhana diperoleh dari pengetahuan lebih mereka atas doktrin-doktrin Syi'ah yang menjadi agama resmi negara. Lebih jauh, para ulama saat itu melegitimasi otoritas merekadengan dasar-dasar ideologis, tentunya yang tidak bertentangan dengan hukum pemerintahan Syafawi.

Pada tahun 1722 kekuasaan Syafawi runtuh. Keruntuhan dinasti ini diikuti pula dengan mudarnya perselisihan Syiah dengan Sunni. Hal ini menjadikan para ulama Syi'ah dapat berkonsentrasi pada penerapan gagasan-gagasan yang sudah ada, terutama tentang masalah metode penafsiran hukum (ijtihad) oleh para ulama dari kelompok Ushuli. Seorang ulama Ushuli pragmatis Muhammad Baqir Bihbihani secara terangterangan memberikan kewenangan dan otoritas pada mujtahid untuk menetapkan aturan-aturan yuridis ketika sumber primer (riwayat) tidak menyediakannya. Kelompok Akhbari juga memulai penerapan ijtihad walaupun terbatas. Legitimasi dalam konsep ini berdasar pada tidak adanya pilihan kecuali ijtihad dalam rangka memperluas jangkauan ilmu fiqh di masa ghaibah Imam.

¹⁷ Siddiqie, Nurzzaan., *Syiah dan Thawarij dalam Prespektip Sejarah*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, Hasil Amandmen Tahun 1989 M, h. 19

¹⁹ Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. "Revolusi Iran 1979 dan Dinamika Politik Nasional." Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1, 2015.

Secara politik, keruntuhan Syafawi membawa pertentangan antarsuku di Iran yang menjadikan suku Qajar muncul sebagai pemenang dan naik sebagai penguasa baru Iran. Kepemimpinan dinasti Qajar (1796-1834) tidak merubah posisi para ulama. Jabatan-jabatan untuk para ulama tetap dipertahankan. Lemahnya sistem administrasi Qajar, mengingat sejatinya mereka adalah suku nomaden yang tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan administrasi pemerintahan, membuat peran para ulama semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ulama khususnya dari kalangan Ushuli yang besar serta kuatnya konsolidasi dan pesatnya perkembangan kekuatan politik dinasti Qajar sama-sama saling menguatkan perjalanan sejarah keduanya.

Pada masa ini ulama menempati posisi sangat strategis sehingga lebih mudah dalam mengembangkan dan menjalankan pemikiran-pemikiran mereka secara praktis. Di masa ini pula, institusi marja' taqlid berdiri. Ia merupakan sebuah konsep yang relatif baru sebagai pengembangan dari doktrin ijtihad versi Ushuli. Institusi ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan di masa selanjutnya, terutama tentang peranan ulama dalam sebuah komunitas sosial dan hubungannya dengan masyarakat.

Konsep wilayat al-faqih

Konsep wilâyat al-faqîh merupakan poros sentral dari pemikiran Syi'ah kontemporer yang mengadopsi sistem politik yang berbasiskan perwalian dengan bersandar pada seorang faqîh yang adil dan kapabel untuk memegang pimpinan negara selama ghaibnya Imam ke dua belas. Konsep ini muncul dari doktrin Imâmah sebagai basis paham Syi'ah Imamiah, karena itu diperlukan untuk menganalisis secara konseptual pengertian wilâyat al- faqîh tersebut

KESIMPULAN DAN SARAN

Eksistensi Republik Islam Iran merupakan salah satu fenomena politik-keagamaan yang paling signifikan dalam sejarah modern dunia Islam. Revolusi yang meletus pada tahun 1979 tidak sekadar merepresentasikan suksesi kepemimpinan, melainkan menandai keruntuhan tatanan monarki absolut Dinasti Pahlavi yang telah bertahta selama ribuan tahun di tanah Persia. Keberhasilan transformasi sistemik ini menempatkan Iran sebagai pusat perhatian global,

mengingat kemampuannya dalam mengintegrasikan doktrin teologis ke dalam struktur negara modern di bawah kepemimpinan ulama karismatik, Ayatullah Ruhullah Khomeini.

Secara historis, kegagalan modernisasi yang diinisiasi oleh Mohammad Reza Shah Pahlavi melalui kebijakan "Revolusi Putih" menjadi katalisator utama gerakan perlawanan. Kebijakan tersebut dinilai terlalu bercorak kebarat-baratan (westernized) dan mengabaikan nilai-nilai sosiokultural serta religiusitas masyarakat lokal. Akibatnya, muncul polarisasi yang tajam antara rezim yang otoriter dengan rakyat yang mengalami alienasi budaya dan kesenjangan ekonomi. Kondisi ini dimanfaatkan secara strategis oleh kalangan ulama Syi'ah untuk memobilisasi massa melalui narasi perlawanan terhadap kezaliman.

Urgensi penelitian ini terletak pada analisis mengenai peran sentral ulama Syi'ah dan implementasi doktrin Velayat al-Faqih (Perwalian Ahli Hukum Islam) sebagai fondasi konstitusional negara. Jika sebelumnya peran ulama Syi'ah cenderung terbatas pada otoritas moral dan pendidikan, pasca-1979 peran tersebut bertransformasi menjadi otoritas politik tertinggi yang bersifat menentukan (decisive). Penelitian ini bertujuan untuk membedah dinamika sejarah revolusi tersebut serta mengeksplorasi bagaimana struktur pemerintahan teokratis-demokratis Iran terbentuk dan bertahan di tengah tekanan geopolitik global. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, artikel ini akan memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara agama dan kekuasaan dalam politik Islam kontemporer

DAFTAR PUSTAKA

- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. Jilid VI. Oxford: Oxford University press, 1995.
- Kedutaan Besar Republik Islam Iran. *Undang-Undang Dasar Iran*. Pasal 5 bab 1.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet, VI. Jilid I. Jakarta: UI-Press, 1985.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Cet. III. Jakarta: UI Pres, 1991.
- Siddiqie, Nurzzaan., *Syiah dan Thawarij dalam Prespektip Sejarah*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Thahir, Adjib. *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam*. Cet, I. Jakareta : PT, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chehabi, H.E, Religion and Politic Iran, dalam Daedalus, Vol. 120. No. 3, Summer,1991

- Rahman, Fazlur, *Revival and Reform in Islam*, dalam Holt et.al. Vol.II “The Further Islamic Land: Islamic Society and Civilization” Seifzadeh Hossein, Ayatullah Khomeini’s Concept of Rightful Government: The Velayat-e- Faqih, dalam Hussain Mutalib and Taj ul-Islam Hashmi (eds), “Islam, Muslim and The Modern State”, 1996
- Daniel, E.L., *The History of Iran*. London: Greenwood Press, 2001
- Moaddel, M., ‘The Shi’i Ulama and the State in Iran,’ *Theory and Society*, vol. 15, no. 4, 1986, pp. 519-556
- Moussavi, A.K. *The Struggle for Authority in the Nineteenth Century Shi’ite Community; The Emergence of the Institution of Marja’i Taqlid*, thesis, Institute of Islamic Studies, McGill University, Ottawa, 1991.
- Ma’lûf, Luwis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’alâm*, Beirut : al-Maktabah alSyarqiyyah, 1987 M
- Algar, Hamid, “Imam Khomeini: Penjelmaan Sebuah Tradisi”, dalam buku, *Gerbang Kebangkitan: Rvolusi Islam Dan Khomeini dalam perbincangan*, Ed. Mustafa W. Hasyim, Yogyakarta: Shalahudin Press, 1984 M
- Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, Hasil Amandmen Tahun 1989 M, h. 19
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Bagir, Haidar. *Pemikiran Politik Syiah: Telaah Historis dan Filosofis*. Bandung: Mizan, 2011.
- Ibrahim, Anwar. *Revolusi Iran dan Transformasi Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. “Revolusi Iran 1979: Analisis Gerakan Sosial Berbasis Religi.” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. “Revolusi Iran 1979 dan Dinamika Politik Nasional.” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1, 2015.
- Jurnal Penelitian Politik LIPI. “Khomeini dan Transformasi Politik Iran Modern.” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 1, 2013.
- Jurnal Penelitian Politik LIPI. “Struktur Kekuasaan Iran Pasca-Revolusi.” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 2, 2014.